



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.693011/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
- 3. Provinsi : (26) BENGKULU
- 4. Kode>Nama Satker : (693011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU
- Sebesar : Rp. 2.364.206.000 (DUA MILIAR TIGA RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 135.05.BF.7121 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 2.364.206.000
Rp. 2.364.206.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 2.364.206.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN B E N G K U L U (016) Rp. 2.364.206.000

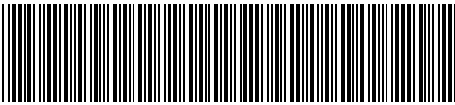
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693011/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:1584-4744-7102-0975

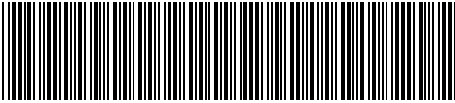
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (693011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						2.364.206.000	
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah						2.364.206.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		150,00	orang	58.730.000		
Rincian Output	:	01	AEF.I01	Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual		150.00	orang	58.730.000		
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		2,00	layanan	1.761.086.000		
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah		1.00	layanan	1.406.803.000		
		02	BAH.002	Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah		1.00	layanan	354.283.000		
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7121.BMA	Data dan Informasi Publik		2,00	dokumen, Peta, Data	544.390.000		
Rincian Output	:	01	BMA.001	Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di wilayah		2.00	Data	544.390.000		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693011/2026
I B. SUMBER DANA



DS:1584-4744-7102-0975

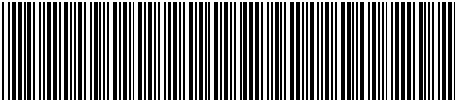
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (693011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

						Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	2.364.206.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693011/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1584-4744-7102-0975

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (693011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU
Kewenangan : (KD)

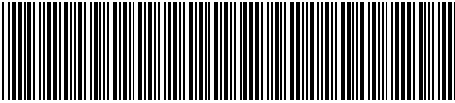
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693011	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU	-	2.364.206	-	-	-	2.364.206	26 . 51 016@ 26 . 51 016@ 26 . 51 016@	
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.364.206	-	-	-	2.364.206		
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	2.364.206	-	-	-	2.364.206		
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	58.730	-	-	-	58.730		
04	PNBP	-	58.730	-	-	-	58.730		
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	1.761.086	-	-	-	1.761.086		
04	PNBP	-	1.761.086	-	-	-	1.761.086		
7121.BMA	Data dan Informasi Publik (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	544.390	-	-	-	544.390		
04	PNBP	-	544.390	-	-	-	544.390		
JUMLAH		-	2.364.206	-	-	-	2.364.206		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693011/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:1584-4744-7102-0975

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode/Nama Satker : (693011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

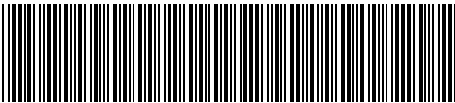
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693011	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	246.612	345.589	196.351	198.306	176.466	229.582	309.486	72.306	90.306	46.306	452.896	2.364.206
		BELANJA BARANG	0	246.612	345.589	196.351	198.306	176.466	229.582	309.486	72.306	90.306	46.306	452.896	2.364.206
		Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	246.612	345.589	196.351	198.306	176.466	229.582	309.486	72.306	90.306	46.306	452.896	2.364.206
135.05.BF.7121		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	246.612	345.589	196.351	198.306	176.466	229.582	309.486	72.306	90.306	46.306	452.896	2.364.206

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693011/2026
IV A. B L O K I R



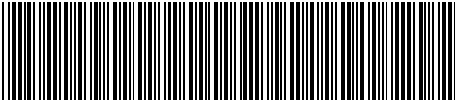
DS:1584-4744-7102-0975

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [693011] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693011	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 39.000
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 844.370		Prioritas Direktif Presiden T.A 2026
	52 Belanja Barang Rp. 844.370		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	135.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)
	7121 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.570
	7121.AEF Sosialisasi dan Diseminasi		Prioritas Direktif Presiden T.A 2026
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.403		522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden T.A 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.400
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden T.A 2026
135.05.BF	522141 Belanja Sewa(PNBP)	7121.BMA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.300		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden T.A 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 263.240
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden T.A 2026
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.040		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden T.A 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 58.013
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden T.A 2026
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.564		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
7121.BAH	Prioritas Direktif Presiden T.A 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 127.052
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden T.A 2026
	7121.BAH Pelayanan Publik Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Data dan Informasi Publik
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 93.620		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden T.A 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.100
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden T.A 2026
	522141 Belanja Sewa(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693011/2026
IV A. B L O K I R



DS:1584-4744-7102-0975

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [693011] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

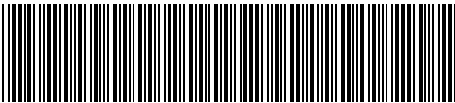
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 184.133 Prioritas Direktif Presiden T.A 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.935 Prioritas Direktif Presiden T.A 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693011/2026
IV B. C A T A T A N



DS:1584-4744-7102-0975

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [693011] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001